

Pengembangan Desa Wisata Berbasis Community Based Tourism (CBT) dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Systematic Literature Review Pada Penerapan Society Centered Approach dalam Pengembangan Pariwisata Desa)

Wahyu Kurniawan Permadi¹, Ike Wanusmawatie², Dhanis Rizky Khairina³

^{1,2,3} Administrasi Publik, Universitas Brawijaya

e-mail: wahyukp@student.ub.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Community Based Tourism* (CBT) dalam pengembangan desa wisata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal melalui pendekatan *society centered*. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan menelaah 10 artikel ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CBT mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, memperkuat kohesi sosial, serta melestarikan budaya dan lingkungan. Faktor pendukung utama meliputi partisipasi aktif masyarakat, keberadaan kelembagaan lokal seperti BUMDes dan Pokdarwis, serta dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya infrastruktur, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Penerapan CBT secara optimal memerlukan sinergi multipihak melalui kolaborasi agar tercipta pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *CBT, Pariwisata, Partisipasi*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of *Community Based Tourism*(CBT) in village tourism development to increase local economic growth through a *society centered* approach. The method used is *Systematic Literature Review*(SLR) by reviewing 10 relevant national and international scientific articles. The results of the study indicate that the implementation of CBT can encourage economic growth in rural communities, strengthen social cohesion, and preserve culture and the environment. The main supporting factors include active community participation, the existence of local institutions such as BUMDes and Pokdarwis, and support from the government and other stakeholders. Meanwhile, the main challenges include limited human resources, minimal infrastructure, and lack of public awareness in environmental conservation. Optimal implementation of CBT requires multi party synergy through collaboration in order to create inclusive and sustainable tourism development.

Keywords : *CBT, Tourism, Participation.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di dunia. Di tengah beragamnya potensi pariwisata, daerah pedesaan menyimpan peluang besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang tidak hanya menarik bagi wisatawan domestik, tetapi juga mancanegara. Pariwisata saat ini tidak lagi sekadar aktivitas rekreasi, namun telah menjadi sektor strategis dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi kawasan pedesaan. Di tengah transformasi arah kebijakan pembangunan global yang menekankan pada keberlanjutan, muncul sebuah pendekatan yang menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat lokal yakni *Community Based Tourism* (CBT). Pendekatan ini relevan dengan paradigma pembangunan yang berpihak pada

masyarakat (*society centered approach*), di mana masyarakat bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek aktif yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan (Niswah & Tukiman, 2021; Purwaningtyas et al., 2024).

Community Based Tourism merupakan suatu pendekatan pengembangan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan. Konsep ini menekankan partisipasi aktif masyarakat, pemerataan manfaat ekonomi, serta perlindungan terhadap budaya lokal dan lingkungan. CBT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan wisata yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal (Sunaryo, 2013). Dalam konteks Indonesia, konsep ini sejalan dengan semangat otonomi daerah dan pembangunan berbasis potensi lokal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Potensi desa sebagai destinasi wisata sejatinya sangat besar, mengingat desa-desa di Indonesia kaya akan keunikan budaya, alam, dan tradisi yang menjadi daya tarik wisata. Desa wisata menjadi bentuk nyata dari penerapan CBT yang menawarkan pengalaman langsung bagi wisatawan dalam kehidupan masyarakat lokal. Hal ini juga memberikan peluang ekonomi baru, terutama dalam sektor jasa, kerajinan, pertanian, dan kuliner (Ahsani et al., 2018; Auliah et al., 2022). Namun demikian, pengembangan desa wisata tidak bisa dilepaskan dari tantangan struktural dan kultural. Penelitian di Desa Sekapuk, Gresik, misalnya, menunjukkan bahwa meskipun dampak ekonomi dari CBT cukup signifikan, namun partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan masih terbatas. Tantangan serupa juga ditemukan di Nagari Pariangan, di mana keterbatasan SDM, infrastruktur, dan kebijakan masih menjadi kendala dalam implementasi CBT secara optimal (Niswah & Tukiman, 2021; Yutaro & Jumiaty, 2025).

Konsep CBT ini sejalan dengan pendekatan *society centered approach* dalam pengembangan pariwisata. Hal itu dikarenakan pendekatan *society centered approach* dalam pembangunan menekankan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar objek, dalam proses pembangunan. Dalam konteks pembangunan desa wisata, pendekatan ini menitikberatkan pada partisipasi aktif, kesadaran kritis, dan kemandirian masyarakat dalam menggali, mengelola, serta melestarikan potensi wisata lokal secara berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pembangunan partisipatif, di mana pembangunan tidak dipaksakan dari atas (*top-down*), tetapi tumbuh dari bawah (*bottom-up*) berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Chambers, 1997). Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan menjaga kelestarian lingkungan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam bentuk kerja fisik, tetapi juga pengambilan keputusan dan inovasi lokal yang relevan (Scheyvens, 2002).

Beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan CBT yang baik dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta memperkuat identitas dan budaya lokal. Di Desa Candirejo, misalnya, koperasi desa wisata yang dikelola oleh warga berhasil menciptakan diversifikasi ekonomi dan memperkuat jejaring sosial. Begitu pula di Desa Ngargoretno, pengembangan eduwisata berbasis masyarakat membuktikan bahwa kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak eksternal mampu menciptakan ekosistem pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Di sisi lain, keberhasilan pengembangan CBT sangat dipengaruhi oleh karakteristik lokal. Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal menjadi aset penting yang membedakan setiap desa wisata. Dalam kasus Nagari Pariangan, misalnya, nilai-nilai Minangkabau yang menjunjung tinggi adat dan musyawarah telah menjadi fondasi sosial dalam pengelolaan pariwisata. Oleh sebab itu, pengembangan desa wisata tidak bisa hanya mengandalkan model generik, melainkan harus adaptif terhadap konteks sosial budaya setempat (Daniati et al., 2022; Hastuti et al., 2024).

Selain aspek ekonomi dan sosial, dimensi lingkungan juga menjadi bagian penting dari pendekatan *society centered*. Pengembangan pariwisata yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan akan berpotensi menimbulkan degradasi sumber daya. Oleh karena itu, penerapan CBT harus pula mempertimbangkan prinsip ekowisata, di mana konservasi lingkungan dan pemanfaatan berkelanjutan menjadi prioritas utama. Pemerintah memiliki peran vital dalam menciptakan ekosistem kebijakan yang mendukung pengembangan CBT. Dukungan dalam bentuk

regulasi, pendanaan, pelatihan, hingga promosi diperlukan agar desa wisata mampu berkembang dengan daya saing tinggi. Dalam hal ini, kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, swasta, media, dan masyarakat menjadi landasan sinergi pembangunan wisata berbasis masyarakat (Alimi & Darwis, 2023; Yutaro & Jumiati, 2025). Dengan demikian, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat melalui pendekatan *society centered* merupakan jawaban atas tantangan pembangunan ekonomi desa.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini dipilih berdasarkan tujuan penelitian untuk menganalisis pengembangan sumber daya aparatur sipil negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui pendekatan SLR, akan diperoleh penjelasan dari berbagai ahli yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang mengenai implementasi mall pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Menurut Snyder (2019), Metodologi *Systematic literature review* berperan sebagai instrumen penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis hasil penelitian terdahulu serta pandangan para ahli. Metode ini menjadi fondasi penting bagi berbagai jenis penelitian karena menghasilkan pemahaman komprehensif tentang perkembangan ilmu pengetahuan, memberikan basis pengambilan kebijakan, dan mendorong inovasi dalam penelitian. Penelitian ini juga membahas strategi yang digunakan penulis dalam mencari artikel yang didapatkan melalui data base penyedia jurnal internasional dan nasional yaitu melalui dan Sinta. Peneliti memilih 10 dokumen untuk analisis akhir setelah tinjauan literatur yang mendeskripsikan mengenai implementasi CBT dan kolaborasi dengan keterlibatan masyarakat pada pengembangan desa wisata dalam pembangunan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. *Literature Review*

No	Research		Hasil
	Writers	Tittles	
1	(Alimi & Darwis, 2023)	Penerapan community based tourism di desa wisata mengarah pada keberlanjutan lingkungan	Penerapan Community Based Tourism (CBT) di Desa Gedepangrango masih berkembang namun menunjukkan kemajuan menuju pariwisata berkelanjutan. Upaya pelestarian lingkungan meliputi daur ulang sampah menjadi produk seperti anyaman, maggot, BBM alternatif, serta penanaman pohon di desa dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Fasilitas wisata mulai dibangun, termasuk jalur menuju area istirahat. Namun, partisipasi masyarakat dalam pelestarian keanekaragaman hayati masih rendah karena pengelolaan berada di bawah KLHK. Diperlukan peningkatan edukasi, integritas ekosistem, dan kapasitas lingkungan
2	(Niswah & Tukiman, 2021)	Penerapan Community Based Tourism (Cbt) Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Sekapuk Kecamatan	Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pada tahap implementasi dan dampak masyarakat telah aktif terlibat serta merasakan manfaat ekonomi seperti penciptaan

		Ujungpangkah Kabupaten Gresik	lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, namun keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan masih minim. Hal ini menandakan bahwa prinsip CBT belum sepenuhnya diterapkan secara menyeluruh.
3	(Hastuti et al., 2024)	Pengembangan Pariwisata Berbasis Community Based Tourism pada Desa Wisata Waburi Park Buton Selatan	Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa CBT di Waburi Park membawa dampak positif bagi masyarakat seperti pengentasan kemiskinan, pelestarian budaya, dan peningkatan pendapatan. Tantangan utama adalah minimnya kapasitas masyarakat dan perlunya pelatihan dalam pengelolaan wisata. CBT dianggap potensial untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di kawasan ini.
4	(Hidayat & Dzulkarnain, 2024)	Pengembangan Infrastruktur Community Based Tourism(CBT) Wisata Halal Berbasis Ekowisata Bahari di Pulau Gili Labak, Madura	Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa keterlibatan pemerintah memegang peran sentral dalam pembangunan infrastruktur desa wisata halal berbasis ekowisata bahari di Gili Labak. Bentuk dukungan yang dibutuhkan tidak terbatas pada pendanaan, melainkan juga mencakup penyusunan regulasi, penetapan kawasan prioritas, perencanaan program wisata terpadu, serta promosi destinasi secara luas di luar wilayah Madura..
5	(Pratama & Kurnia, 2018)	Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus: Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung)	Hasil penelitian, Menggunakan analisis SWOT, penelitian ini menghasilkan strategi pengembangan desa wisata yang berbasis masyarakat berupa diversifikasi paket wisata, penguatan interaksi langsung dengan lingkungan, serta kerjasama dengan biro perjalanan. Kendala utama adalah penurunan kunjungan dan kurangnya promosi.
6	(Daniati et al., 2022)	Potensi Pengembangan Wisata Edukasi Berbasis Community Based Tourism di Desa Wisata Ngargoretno	Hasil penelitian mendeskripsikan Desa Wisata Ngargoretno telah memenuhi syarat sebagai destinasi eduwisata dengan atraksi utama Peternakan Kambing Etawa dan Bukit Marmer Merah Manoreh yang kaya nilai edukatif. Aksesibilitas

			dan layanan penunjang tergolong baik, meski fasilitas pendukung masih perlu peningkatan. Peran aktif masyarakat melalui BUMDes, POKDARWIS, dan LPP didukung pelatihan pengelolaan desa wisata yang difasilitasi oleh kerja sama dengan Badan Otorita Borobudur dan institusi pendidikan..
7	(Yutaro & Jumiati, 2025)	Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Pengelolaan Desa Wisata Di Kenagarian Pariangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan community based tourism CBT memberi dampak positif di aspek ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi masih lemah di dimensi lingkungan dan politik. Faktor penghambat meliputi keterbatasan SDM dan infrastruktur. Perlu edukasi masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk keberlanjutan.
8	(Ahsani et al., 2018)	Penerapan Konsep Community Based Tourism (CBT) Di Desa Wisata Candirejo Borobudur Mewujudkan Kemandirian Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi lokal sebagai kekuatan utama dalam pengembangan desa wisata. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan CBT sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan lokal, partisipasi aktif masyarakat, dan penguatan kelembagaan. CBT diposisikan sebagai alat pemberdayaan untuk mencapai kemandirian desa
9	(Auliah et al., 2022)	Strategi Pengembangan Desa Wisata Kreatif Berbasis Masyarakat Kearifan Lokal Hendrosari Gresik	Hasil Penelitian ini mendeskripsikan ide dari strategi pengembangan desa wisata kreatif berbasis masyarakat dan kearifan lokal dengan penguatan UMKM dan media sosial sebagai alat promosi. Kelemahan infrastruktur UMKM dan perlunya pelatihan PIRT menjadi fokus utama perbaikan untuk kesejahteraan masyarakat.
10	(Purwaningtyas et al., 2024)	Pengembangan Wisata Berbasis Community Based Tourism Di Desa Wisata Kemiren Banyuwangi	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengembangan Desa Wisata Kemiren memiliki potensi budaya kuat seperti Suku Osing, namun pengembangan CBT belum optimal. Dukungan pemerintah dan kelompok sadar wisata membantu, tetapi rendahnya SDM pariwisata

dan partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama.

Sumber : Diolah Peneliti (2025)

Penerapan Community Based Tourism (CBT) dalam pengembangan pariwisata menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam seluruh aspek pariwisata: perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, hingga evaluasi. Konsep ini bukan hanya alat pemberdayaan masyarakat, tetapi juga strategi pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Dalam dimensi ekonomi, CBT memberikan dampak yang signifikan dalam menciptakan peluang pendapatan baru dan mendiversifikasi sumber penghasilan masyarakat. Masyarakat lokal dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti pengelolaan homestay, penyediaan jasa kuliner tradisional, pemanduan wisata, dan produksi serta penjualan kerajinan tangan berbasis budaya lokal. Studi di Desa Wisata Candirejo menunjukkan bahwa keberadaan koperasi lokal dan sistem manajemen komunitas mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja baru dan penguatan ekonomi desa secara kolektif. Hal serupa juga terjadi di Desa Waburi Park, di mana integrasi antara sektor pariwisata dan ekonomi lokal melalui pelatihan-pelatihan teknis memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (Hastuti et al., 2024; Niswah & Tukiman, 2021).

Dalam dimensi sosial, implementasi CBT terbukti mampu memperkuat kohesi sosial dan membangun solidaritas antarwarga. Masyarakat terdorong untuk berkolaborasi dalam pengelolaan kegiatan pariwisata, yang pada akhirnya meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya peran bersama dalam pembangunan desa. Sebagai contoh, di Desa Ngargoretno, pembentukan dan penguatan kelembagaan lokal seperti Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi indikator nyata dari tingginya tingkat partisipasi sosial masyarakat dalam pengembangan pariwisata (Daniati et al., 2022). Dalam dimensi budaya CBT berfungsi sebagai instrumen pelestarian identitas dan nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Destinasi wisata yang dikembangkan dengan pendekatan ini cenderung mengedepankan keaslian budaya dan tradisi masyarakat, seperti yang terlihat pada pengembangan Desa Wisata Kemiren di Banyuwangi yang mengangkat kebudayaan Suku Osing sebagai daya tarik utama. Di tempat lain, seperti Desa Pariangan, nilai-nilai adat Minangkabau dijaga dan dipromosikan sebagai bagian integral dari produk wisata berbasis budaya lokal. Kedua contoh ini memperlihatkan bahwa CBT memiliki peran strategis dalam melindungi dan mempromosikan warisan budaya di tengah derasnya arus modernisasi (Purwaningtyas et al., 2024; Yutaro & Jumiaty, 2025).

Pada dimensi lingkungan, CBT menunjukkan kontribusi positif terhadap pelestarian alam dan sumber daya hayati melalui penerapan prinsip-prinsip ekowisata. Upaya seperti pengelolaan sampah, penanaman pohon, dan konservasi kawasan hutan menjadi bagian penting dari aktivitas wisata yang edukatif dan berkelanjutan. Studi di Gili Labak menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya bergantung pada kesadaran masyarakat, tetapi juga pada dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur ramah lingkungan. Hal yang sama terlihat di Desa Gedepangrango, di mana kegiatan konservasi lingkungan dilakukan secara partisipatif dan menjadi bagian dari program edukasi masyarakat (Alimi & Darwis, 2023; Hidayat & Dzulkarnain, 2024). Sementara itu, dimensi politik menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi CBT sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kebijakan yang mendukung, sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta pengakuan terhadap kelembagaan lokal merupakan kunci dalam menciptakan tata kelola pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Kasus di Desa Sekapuk dan Gili Labak menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa, pelaku wisata, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membentuk arah pembangunan pariwisata yang terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan lokal (Hidayat & Dzulkarnain, 2024; Niswah & Tukiman, 2021).

Namun, tidak semua desa mampu mengoptimalkan semua dimensi tersebut secara bersamaan. Sejumlah tantangan struktural seperti rendahnya kapasitas SDM, keterbatasan anggaran, dan ketergantungan pada pihak eksternal menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan

yang holistik. Dalam impelementasinya, CBT terdapat faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat. Faktor tersebut diantaranya :

Faktor Pendukung

1. Partisipasi Aktif Masyarakat Lokal dimana partisipasi aktif menjadi landasan utama CBT. Keikutsertaan warga dalam pengelolaan wisata meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan destinasi wisata. Di Desa Ngargoretno, keterlibatan masyarakat melalui BUMDes dan kelompok sadar wisata menunjukkan contoh sukses pengorganisasian masyarakat untuk pengembangan eduwisata.
2. Kelembagaan Lokal yang Kooperatif dimana adanya lembaga seperti koperasi desa wisata, BUMDes, atau Pokdarwis sangat mendukung pengelolaan wisata yang terstruktur. Di Desa Candirejo, misalnya, koperasi lokal menjadi motor penggerak utama dalam mendukung berbagai aspek CBT, mulai dari penyediaan layanan wisata hingga distribusi keuntungan.
3. Potensi Budaya dan Kearifan Lokal dimana keunikan adat, tradisi, dan budaya lokal seperti yang terdapat di Desa Kemiren Banyuwangi dengan keberadaan Suku Osing, menjadi daya tarik yang membedakan destinasi CBT dengan model wisata lainnya. Potensi budaya ini jika dimanfaatkan dengan baik akan memperkuat identitas destinasi.
4. Dukungan Dari Pemerintah dan Pihak Pemangku Kepentingan Lain dimana dukungan kebijakan, pembiayaan, serta program pelatihan dari pemerintah dan mitra swasta maupun Lembaga Peduli Pariwisata lainnya dapat mempercepat pengembangan CBT. Di Gili Labak, misalnya, dukungan pemerintah dalam promosi dan pembangunan infrastruktur menjadi kunci pengembangan ekowisata bahari.
5. Penguatan Kapasitas Melalui Pelatihan dimana pelatihan dalam manajemen pariwisata, pengelolaan homestay, dan promosi digital terbukti meningkatkan kapasitas warga dalam mengelola wisata. Hal ini ditemukan dalam studi pengembangan Waburi Park, Buton Selatan.

Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dimana kurangnya pengetahuan dan keterampilan warga lokal dalam mengelola destinasi menjadi tantangan utama. Di Desa Kemiren, keterbatasan SDM bidang pariwisata menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi yang ada .
2. Minimnya Infrastruktur Pendukung dimana kurangnya fasilitas dasar seperti transportasi, penginapan, sanitasi, dan konektivitas digital dapat menurunkan kenyamanan wisatawan. Studi di Gili Labak menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala besar dalam pengembangan wisata.
3. Kurangnya Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat dimana tidak semua masyarakat memahami atau tertarik untuk terlibat dalam pengembangan wisata. Di Desa Pariangan, meskipun potensi tinggi, keterlibatan masyarakat belum merata sehingga CBT belum berjalan optimal.
4. Ketergantungan Pada Bantuan Eksternal dimana ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah atau donor dapat melemahkan inisiatif lokal dan keberlanjutan program. Hal ini terlihat pada beberapa kasus di mana CBT belum dapat berjalan secara mandiri tanpa intervensi luar.
5. Isu Lingkungan dan Daya Dukung dimana kurangnya kesadaran akan pelestarian lingkungan dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan dapat merusak keberlanjutan destinasi wisata. Di Desa Gedepangrango, eksploitasi hutan dan limbah menjadi masalah dalam implementasi CBT yang berwawasan lingkungan.

SIMPULAN

Penerapan *Community Based Tourism* (CBT) dalam pengembangan pariwisata selaras dengan *society centered approach* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pembangunan, bukan sekadar objek. Hal itu dikarenakan CBT mampu: (1) Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, (2) Memperkuat identitas budaya lokal, (3) Meningkatkan partisipasi

sosial dan kelembagaan masyarakat, (3) Mendorong konservasi lingkungan. Namun, implementasi CBT belum optimal secara menyeluruh. Terdapat tantangan utama seperti: (1) Keterbatasan SDM dan kapasitas manajerial, (2) Minimnya infrastruktur pendukung, (3) Rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat di beberapa wilayah (4)Ketergantungan pada bantuan eksternal, (5) Ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya. Faktor keberhasilan CBT sangat bergantung pada: (1) Partisipasi aktif masyarakat, Kelembagaan lokal yang kuat dan kooperatif, (2) Potensi budaya yang unik (3) Dukungan pemerintah dan pihak swasta, (3) Pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Dengan demikian, CBT menjadi strategi pembangunan pariwisata yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsani, R. D. P., Suyaningsih, O., Ma'rifah, N., & Aerani, E. (2018). Penerapan konsep community based tourism (CBT) di desa wisata candirejo borobudur mewujudkan kemandirian desa. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 135–146. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2270>
- Alimi, R., & Darwis, R. S. (2023). Penerapan community based tourism di desa wisata mengarah pada keberlanjutan lingkungan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(2), 436–443. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i2.20377>
- Auliah, I., Selintung, M., & Syafri, S. (2022). Strategi Pengembangan Desa Wisata Kreatif Berbasis Masyarakat Kearifan Lokal Hendrosari Gresik. *Urban and Regional Studies Journal*, 5(1), 09–14. <https://doi.org/10.35965/ursj.v5i1.1961>
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Daniati, H., Maulina, L., Kuswandi, D., Irani Nugraha, S. Y., & Rosiana, E. N. (2022). Potensi Pengembangan Wisata Edukasi Berbasis Community Based Tourism di Desa Wisata Ngargoretno. *Tourism Scientific Journal*, 7(2), 171–186. <https://doi.org/10.32659/tsj.v7i2.117>
- Hastuti, Maulana, H. F., Mahyudin, & Rahim, A. (2024). Pengembangan Pariwisata Berbasis Community Based Tourism pada Desa Wisata Waburi Park Buton Selatan. *Journal of Human And Education*, 4(1), 545–550.
- Hidayat, M. A., & Dzulkarnain, I. (2024). Pengembangan Infrastruktur Community Based Tourism(CBT) Wisata Halal Berbasis Ekowisata Bahari di Pulau Gili Labak, Madura. *Abdimas Pariwisata*, 5(1), 42–49. <https://doi.org/10.36276/jap.v5i1.484P>
- Niswah, M., & Tukiman, T. (2021). Penerapan Community Based Tourism (Cbt) Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. *Journal Publicuho*, 4(2), 591. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18232>
- Pratama, F. G., & Kurnia, G. (2018). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus: Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 5(1), 1014–1028. <https://jurnal.unigal.ac.id/agroinfoagaluh/article/view/1572/0>
- Purwangingtyas, A., Yustita, A. D., & Ermawati, E. A. (2024). Pengembangan Wisata Berbasis Community Based Tourism Di Desa Wisata Kemiren Banyuwangi. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 7(1), 79–83. <https://doi.org/10.23887/jmpp.v7i1.76144>
- Scheyvens, R. (2002). *Tourism for Development: Empowering Communities*. Pearson Education.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(July), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Yutaro, S. S., & Jumiati. (2025). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Pengelolaan Desa Wisata Di Kenagarian Pariangan. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 1(2), 43–51.